



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai pengertian mengenai teori dan konsep diperlukan bagi peneliti sebagai dasar dari kajian penelitian. Salah satu medium yang digunakan untuk menemukan berbagai macam teori yang diperlukan untuk kajian dan berbagai macam konsep dapat peneliti temukan salah satunya melalui penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa jurnal yang sesuai dan mendukung penelitian yang disusun peneliti.

Penelitian pertama berasal dari jurnal ilmiah milik Chloe Lim (2018) yang berjudul *Checking How Fact-Checkers Check*. Lim melakukan kajian untuk menilai performa yang dilakukan oleh para pengecek fakta di dua badan pengecekan fakta di Amerika Serikat, yakni Fact Checker dan Politifact, dalam melakukan pengecekan fakta terkait politik (khususnya klaim yang disampaikan oleh pejabat publik). Dalam penelitiannya, Lim menemukan bahwa kegiatan pengecek fakta dalam melakukan verifikasi informasi tidaklah maksimal. Dari 10 pernyataan yang disajikan oleh Lim, hanya satu yang diperiksa kebenarannya oleh para pengecek fakta, sebab, Lim menemukan bahwa para pengecek fakta cenderung untuk tidak memeriksa fakta yang sebelumnya sudah diperiksa oleh pengecek fakta yang lain. Meski penelitian ini tidak menemukan performa pengecekan fakta yang maksimal, Lim

menemukan bahwa para pengecek fakta dapat memberikan evaluasi yang baik pada fakta yang berada pada kutub ekstrem (fakta tersebut harus merupakan fakta yang paling benar atau fakta yang paling salah).

Lim melakukan penelitiannya dengan cara menyediakan beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat politik dengan berfokus pada klaim kampanye mereka. Melalui pernyataan ini, Lim menilai seberapa sering para pengecek fakta (yang berbeda) setuju dengan suatu pernyataan yang sama. Apabila pada satu pernyataan/ klaim ditemukan tingkat persetujuan atau kesimpulan yang sama dari tiap pengecek fakta, maka fakta tersebut dinilai baik. Melalui penelitian ini, terdapat dua aspek penting yang ditemukan guna mengevaluasi suatu fakta atau pernyataan. Pertama, Lim memastikan bahwa fakta tersebut harus diperiksa secara *overlap*. Praktik *fact-checking* diindikasikan berjalan secara *overlap* apabila dilakukan lebih dari satu pengecek fakta (*multiple fact-checkers*), dengan kata lain, ada mata kedua yang melakukan pengecekan fakta.

Dalam penelitiannya, Lim mendapati bahwa masih terdapat kesulitan dalam mencapai tingkat *overlap* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena para pengecek fakta cenderung untuk mengulang kegiatan pengecekan fakta dengan proses yang sama seperti pada proses pengecekan fakta sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Sehingga, hasil akhirnya pun tidak berberda jauh. Selain itu, Lim melalui wawancara dengan para pengecek fakta mendapati fakta bahwa kinerja pengecek fakta banyak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan

para pengecek fakta yang tinggi terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat publik.

Selain aspek *overlap*, kegiatan pengecekan fakta yang efektif juga dipengaruhi dengan kesimpulan akhir yang diciptakan oleh para pengecek fakta. Kesimpulan akhir yang dihasilkan oleh masing-masing pengecek fakta harus sama untuk dapat mencapai hasil yang akurat. Meski demikian, aspek ini belum dapat berjalan maksimal karena Lim mendapati bahwa para pengecek fakta masih banyak menentukan benar salahnya suatu pernyataan berdasarkan keputusan pribadi. Hal ini diindikasikan dengan sedikitnya argumen yang diberikan terkait keputusan benar atau salah yang mereka jatuhkan kepada sebuah pernyataan.

Penelitian terdahulu yang pertama ini memiliki kesesuaian terkait topik yang hendak peneliti angkat di dalam penelitian ini, yaitu terkait pengecekan fakta (*fact-checking*). Peneliti pun hendak menggunakan sudut pandang yang sama seperti yang digunakan oleh Chloe Lim pada penelitian sebelumnya. Chloe Lim melihat praktik *fact-checking* dari sudut pandang pelakunya. Meski demikian, peneliti mendapati bahwa penelitian Chloe Lim hanya bertujuan untuk mengukur seberapa kuat praktik pengecekan fakta yang dilakukan oleh para pengecek fakta dari sisi praktis saja. Namun, Chloe Lim tidak melakukan penelusuran terkait pemahaman pelaku pengecek fakta terhadap konsep *fact-checking* itu sendiri.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga membahas kinerja para pengecek fakta yang tidak tergabung di dalam sebuah media, namun para pengecek fakta yang tergabung di dalam sebuah badan khusus pengecekan fakta. Pada penelitian ini, peneliti akan terfokus pada pemahaman dan juga kesesuaian proses yang dijalani oleh para pengecek fakta dalam melakukan praktik *fact-checking*. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan pengukuran menggunakan skala ordinal, sehingga hasil yang diperoleh pun disajikan dengan menggunakan data dan juga grafik.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para pengecek fakta di Kompas.com agar aspek pemahaman yang hendak dicapai dapat diperoleh secara maksimal. Jika pada penelitian pertama, Lim terfokus untuk melakukan pengecekan fakta pada pernyataan politisi, pada penelitian ini, pengecekan fakta akan difokuskan pada informasi-informasi baik dalam bentuk teks maupun visual yang diperoleh melalui internet, yang dinilai lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Penelitian kedua merupakan penelitian milik Gordon Farrer (2017) dalam jurnal berjudul *Fact check unit an opportunity for a new kind of J. education*, Farrer melakukan kajian untuk menemukan standar pengecekan fakta yang baik untuk bidang keilmuan jurnalistik terutama di Australia. Farrer (2017) mengatakan bahwa jurnalis memiliki kecenderungan untuk membuat

pemberitaan dengan menyertakan kutipan secara langsung. Kutipan langsung yang berasal dari narasumber memang meningkatkan kredibilitas informasi, namun tak bisa dipungkiri bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya akurat. Hal ini membuat praktik jurnalistik yang paling ideal adalah dengan melakukan pengambilan kesimpulan dari beberapa narasumber yang berbeda.

Penelitian ini memiliki kesesuaian yang cukup dengan topik yang hendak diangkat oleh peneliti. Tidak hanya berkaitan dengan argumentasi yang disampaikan oleh politisi, masyarakat sendiri cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap informasi yang tersebar di dunia maya, tanpa mengetahui apakah informasi yang tersebar sudah dibuktikan kebenarannya.

Meski demikian, temuan dari penelitian ini hanya terfokus pada salah satu aspek yang melatarbelakangi kinerja para pengecek fakta saat melakukan *fact-checking* yakni adanya kecenderungan untuk memercayai klaim yang dikemukakan oleh sosok yang memiliki jabatan tinggi. Penemuan serupa disampaikan pada Chloe Lim di bahasan penelitian pertama. Penelitian ini membawa celah lain juga bagi peneliti untuk melakukan pendalaman terkait pemahaman yang dimiliki oleh para pengecek fakta di Kompas.com terlebih dahulu sebelum nantinya melakukan pendalaman terkait proses yang dilakukannya untuk kemudian dihubungkan kesesuaiannya.

Penelitian ketiga berjudul *Fact Checking the Campaign: How Political Reporters Use Twitter to Set the Record Straight (or Not)* yang disusun oleh

Mark Coddington, Logan Molyneux, dan Regina G. Lawrence pada 2014. Penelitian ini hendak membahas bagaimana teknik jurnalis politik di Amerika Serikat dalam melakukan pengecekan fakta yang berasal dari jejak digital yang tersebar melalui platform media sosial Twitter mengenai isu politik yang ada.

Penelitian ini melakukan kajian mengenai fakta seperti apa yang diproses dalam pengecekan fakta yang lebih jauh. Penelitian ini juga meninjau pernyataan seperti apa yang dianggap lebih objektif, apakah kebenaran yang berdasarkan objektivitas profesional (pernyataan sosok yang dianggap mumpuni di bidangnya) ataukah kebenaran yang didasarkan pada objektivitas ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa objektivitas profesional memiliki peran yang lebih besar dalam proses pengecekan fakta lewat media sosial Twitter ini.

Penelitian ini dianggap memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan topik yang hendak peneliti angkat. Hal ini dikarenakan penelitian ini membahas model *fact-checking* mengenai isu atau informasi yang diperoleh dari ruang digital khususnya sosial media. Meski demikian, penelitian ini memiliki sudut pandang berbeda dengan metode yang peneliti gunakan. Penelitian ini terfokus pada pendalaman perihal konten atau materi yang hendak diperiksa kebenarannya, meliputi objektivitas seperti apa yang dipilih jurnalis di dalam mengidentifikasi kebenaran. Sedangkan, penelitian yang peneliti angkat, berkiblat pada penelitian Lim, lebih terfokus dari kinerja pelaku pengecek fakta itu sendiri.

Penelitian keempat berjudul *Ahead of the e-Curve in Fact Checking and Verification Education: The University of Hong Kong's Cyber News Verification Lab Leads Verification Education in Asia* oleh Anne Kruger pada 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan pada proyek eksperimental bertajuk *Cyber News Verification Lab*. Cyber News Verification Lab sendiri adalah badan yang didirikan oleh Hong Kong University bersama First Draft News dan Google News Lab. Badan ini didirikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terutama dalam melakukan verifikasi pada materi daring untuk kemudian dievaluasi dan dilaporkan kembali sesuai dengan kaidah jurnalistik. Penelitian ini juga mengangakat istilah *debunk* dan *discern*. Materi yang diteliti pun tidak sebatas pada pernyataan atau klaim yang dinyatakan oleh para pejabat publik, namun keseluruhan materi yang diperoleh melalui media daring mulai dari foto, video, hingga pesan yang diperoleh secara daring. Misalnya saja, pemeriksaan berita terkait gawai Samsung yang meledak. Apakah informasi tersebut mengandung konten iklan, atau merupakan konten berita yang murni. aka dari itu, konsep yang ada pada penelitian ini dilandaskan pada konsep verifikasi sumber daring yang dikemukakan oleh Clare Wardle, seorang peneliti dari lembaga First Draft, ketimbang konsep *fact-checking* yang dikemukakan oleh IFCN yang lebih condong kepada pemeriksaan pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat publik.

Penelitian yang dilakukan Anne Kruger ini berfokus untuk melihat apakah proyek eksperimental yang dilakukan pada mahasiswa Hong Kong University

ini dapat berjalan dengan baik dalam melakukan pengecekan terhadap materi digital. Penilaian dilakukan dengan menetapkan lima aspek dari sisi teknis, kemampuan observatif, kemampuan untuk mempertanyakan motif penyebar informasi digital, melakukan pemeriksaan dengan membandingkan beberapa data dari data yang ada, data dari pemerintah, dll., hingga melakukan kontak langsung dengan pembuat konten. Melalui penelitian ini didapati bahwa, mahasiswa cenderung melakukan verifikasi informasi setelah memperoleh materi ini. Penelitian ini pun menyebutkan bahwa pemberitaan materi terkait pengecekan fakta digital membawa perubahan sikap yang mendukung aktivitas dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan *fact-check* dan *debunking*. Melalui penelitian ini didapatkan bahwa proses penelitian fakta tidak hanya terbatas pada pengecekan pernyataan yang dilakukan oleh pejabat publik, namun juga informasi umum lain yang tersebar melalui media sosial.

Melalui penelitian terdahulu ini, peneliti melakukan kombinasi terhadap temuan untuk dan berhasil menemukan celah baru dalam melakukan penelitian pada para pengecek fakta di Kompas.com. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk menggali level pemahaman pelaku pengecek fakta di Kompas.com yang telah lolos uji sertifikasi milik IFCN, dalam melakukan pengecekan fakta dari informasi digital yang ditemukan melalui internet.

Peneliti tidak hanya berfokus pada isu terkait politik, namun yang lebih universal. Setelah memperoleh tingkat pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com terkait konsep *fact-checking*, peneliti pun melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui proses yang digunakan dalam melakukan pengecekan fakta. Hal ini dilakukan agar pada akhirnya, peneliti dapat menarik benang merah, untuk menguji kesesuaian, terkait pemahaman dan praktik yang dilakukan oleh pengecek fakta di Kompas.com di dalam melakukan praktik *fact-checking* pada konten multimedia yang tersebar melalui internet.

2.2 Konsep dan Teori

Teori dan konsep yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Fact Checking, Debunking, dan Verifikasi

Vlachos dan Riedel mendefinisikan *fact-checking* sebagai usaha untuk memastikan kebenaran dari klaim yang dilontarkan oleh pejabat atau orang terkenal yang memiliki pengaruh (Vlachos & Riedel, 2014, p. 18). Konsep *fact-checking* seringkali dikaitkan erat dengan isu yang bernuansa politis. Sebab, politisi ataupun aktivitas politik sarat dengan konten yang dilebih-lebihkan bahkan tidak rasional.

Penelitian ini menggunakan konsep *fact-checking* yang bersifat “*ex-post*”. *Fact-checking* yang bersifat “*ex-post*” adalah *fact-checking* yang dilakukan terhadap suatu isu atau klaim yang sudah terpublikasi dan menjadi viral di kalangan masyarakat untuk kemudian diperjelas atau

disanggah kebenarannya. Informasi tersebut pun berkaitan dengan klaim, pernyataan, atau kampanye yang dilakukan oleh pejabat publik. Meski demikian, *konsep fact-checking* yang bersifat “*ex-post*” cenderung terfokus pada kegiatan pengecekan kebenaran dari pernyataan atau klaim yang bersifat politis atau berasal dari kegiatan kampanye (UNESCO, 2018, p. 86).

Inti dari kegiatan *fact-checking* seperti ini adalah untuk melakukan klarifikasi pada pernyataan yang dikemukakan pejabat publik yang memiliki peran besar di dalam masyarakat (UNESCO, 2018, p. 87). Biasanya para pengecek kebenaran melakukan kegiatan *fact-checking* dengan melibatkan pakar-pakar yang memiliki kompetensi di bidang tertentu untuk menguji pernyataan, klaim, atau kampanye yang dikeluarkan oleh pejabat publik.

Hasil penelusuran inilah yang menentukan apakah pernyataan, klaim, atau kampanye tersebut dapat diyakini sebagai kebenaran (UNESCO, 2018, p. 88). Kegiatan ini dapat dilakukan dari praktik pengecekan fakta yang dilakukan oleh beberapa badan pengecekan fakta seperti PolitiFact, dll.

Meski awalnya kegiatan *fact-checking* dinilai hanya terfokus untuk mengklarifikasi konten politik, namun seiring berjalannya waktu, konsep ini mengalami perkembangan. Pada tahap selanjutnya, *fact-checking* juga berusaha memeriksa informasi yang diindikasikan sebagai *information*

disorder (penyakit informasi). Penyakit informasi yang dimaksud adalah ragam informasi atau berita yang disebarkan melalui media sosial untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu, namun menjadi hangat dibicarakan masyarakat (UNESCO, 2018, p. 87).

Dalam perkembangan konsep *fact-checking* di gelombang kedua ini, lahir suatu istilah yang melibatkan kegiatan ‘penyisihan’ yang disebut sebagai *debunking*. *Debunking* adalah bagian dari *fact-checking* yang melibatkan keahlian tertentu (keterampilan maupun alat) yang seringkali dijumpa dalam tahap verifikasi (UNESCO, 2018, p. 87). Informasi yang disanggah biasanya adalah konten sensasional yang menjadi viral di kalangan pengguna internet.

Kegiatan *fact-checking*, khususnya *debunking* memang bersinggungan dengan kegiatan verifikasi, namun praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai verifikasi. Sebab, melalui pengertiannya, verifikasi adalah proses pengecekan kebenaran yang dilakukan sebelum informasi tersebut tersebar atau disebarkan ke masyarakat (*ex-ante*). Biasanya, pihak yang dilibatkan adalah mereka yang memegang informasi awal atau mereka yang berperan sebagai saksi mata. Hasil akhirnya adalah penentuan apakah informasi tersebut dipublikasikan atau tidak kepada masyarakat luas (UNESCO, 2018, p. 88).

Secara umum, praktik *fact-checking* berjalan pada tiga tahap, yaitu untuk menentukan apakah suatu informasi layak dilakukan pengecekan atau tidak, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan bukti pendukung sebuah informasi, dan ditutup dengan menerbitkan pernyataan terkait kebenaran suatu informasi (UNESCO, 2018, p. 89). Menentukan layak atau tidaknya sebuah pernyataan dapat diperiksa atau tidak ditentukan dengan cara memisahkan mana pernyataan yang dapat diperiksa dan pernyataan mata yang seharusnya diperiksa.

Kedua, pencarian bukti pendukung yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diangkat dalam sebuah pernyataan (Kruger, 2017, p. 267). Proses kedua ini ditentukan dari beberapa faktor meliputi *proximity* yang berkaitan dengan kedekatan narasumber dengan sebuah isu, *expertise* seberapa kuat tingkat penguasaan materi atau keahlian dari narasumber terkait isu tertentu, *rigour* yang berkaitan dengan bagaimana suatu data yang mendukung pembuktian fakta atas suatu isu itu dikumpulkan, *transparency* terkait keterbukaan pada bukti yang dimiliki narasumber, *reliability* yang menyangkut *track record* dari narasumber, dan *conflict of interest* untuk memastikan bahwa narasumber tidak memiliki kepentingan tertentu dengan isu yang sedang diangkat (UNESCO, 2018, p. 96) .

Terakhir, penyajian hasil akhir yang biasanya dilakukan dengan menetapkan skala kebenaran akan sebuah pernyataan atau informasi. Secara khusus, karena penelitian ini difokuskan pada kegiatan *debunking*, maka pemeriksaan data digital dilakukan dengan melibatkan proses verifikasi data

digital. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep milik First Draft News. Pemilihan konsep First Draft News dilakukan karena First Draft News menyediakan pedoman verifikasi konten digital yang lengkap bagi semua aspek di media sosial (Kruger, 2017, p. 267).

Dalam memeriksa data-data digital yang berkaitan dengan proses *debunking* dan verifikasi, terdapat beberapa proses yang dapat dilalui. Pertama dengan melihat keaslian (*provenance*), yaitu upaya untuk melakukan penelusuran untuk menemukan konten multimedia asli sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dari aspek metadata. Dalam hal ini, penelusuran terkait metadata tidak bisa ditelusuri apabila konten yang digunakan tidak asli. (“First Draft Checklist”, 4 Oktober, 2017)

Kedua, melihat sumber (*source*), yaitu upaya untuk mencari pihak yang membuat konten. Membuat konten yang dimaksud tidak diartikan sebagai siapa yang mengunggah konten, namun siapa yang menangkap (mengambil foto atau video) suatu konten. Pencarian pihak yang pertama kali mengunggah atau membuat konten dilakukan sebagai salah bagian dari aspek etis. Hal ini salah satunya dengan melakukan penelusuran terhadap akun demi akun media sosial, hingga pada akhirnya berujung pada akun sang pembuat konten asli tersebut.

Praktik ini dilakukan untuk memastikan apakah konten (yang difoto atau diambil videonya) tersebut diproduksi oleh pihak yang tepat. Misalnya saja, ketika seseorang menerbitkan klaim bahwa dirinya mengambil gambar

terkait peristiwa yang terjadi di lokasi A, padahal setelah dilakukan penelusuran, pihak tersebut di lokasi X yang letaknya sangat jauh. Praktik ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan dan ketidakmungkinan yang terjadi (“First Draft Checklist”, 4 Oktober, 2017).

Ketiga, dengan melihat aspek tanggal (*date*), yaitu upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi kapan sebuah konten diambil. Tanggal yang dimaksud bukan dimaksudkan sebagai tanggal sebuah konten diunggah, namun tanggal yang menunjukkan kapan konten diproduksi. Hal ini penting untuk dilakukan, karena seringkali para pengecek fakta mengidentifikasi tanggal pengunggahan sebagai tanggal asli sebuah konten diproduksi atau dihasilkan. (“First Draft Checklist”, 4 Oktober, 2017).

Keempat, melihat aspek lokasi (*location*), yaitu upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi di mana suatu konten terjadi dan diambil (gambar atau videonya). Hal ini disebut sebagai tahap yang paling penting untuk dilakukan, mengingat konten visual mudah untuk dimanipulasi, sehingga harus dilakukan penelusuran lokasi yang mendalam (“First Draft Checklist”, 4 Oktober, 2017).

Kelima adalah dengan melihat motivasi (*motivation*), yaitu upaya yang dilakukan untuk mencari motivasi dari sang pencipta konten dalam menggarap konten tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari latar belakang pemilik konten (“First Draft Checklist”, 4 Oktober, 2017).

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap konten digital, perlu adanya pemahaman terhadap jenis kesalahan yang kerap muncul. Tom Trewinnard dan Fergus Bell mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu kesalahan tempat atau tanggal, konten yang dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak tertentu, dan konten yang diada-ada yaitu konten yang dibuat atau disebar dengan maksud yang menyesatkan (UNESCO, 2018, p. 106).

2.2.2 Information Disorder (Penyakit Informasi)

Masyarakat pada umumnya memahami kesalahan informasi sebagai hoax dan *fake news*. Istilah ini berkembang seiring dengan berlangsungnya pesta demokrasi di Amerika Serikat pada 2016 silam. Zhang et al. (2016) mendefinisikan *fake news* sendiri sebagai ulasan menipu yang bertujuan untuk memengaruhi konsumen/ penikmatnya tanpa melakukan kontak langsung dengan produk atau kejadian yang menjadi bagian dari ulasannya (dalam Tandoc et al., 2017, p. 139). Selain itu, Wardle dan Derakhsan juga beranggapan bahwa konsep *fake news* cenderung lebih emosional dan bertujuan untuk mendiskreditkan kerja jurnalis. Alasan inilah yang membuat kedunya memperkenalkan pengembangan konsep *fake news* ke dalam konsep mininformasi, disinformasi, dan malinformasi (UNESCO, 2018, p. 14).

Penelitian ini menggunakan ketiga konsep ini dalam menguji pengaplikasian konsep *fact-checking* milik jurnalis di Indonesia dalam melakukan identifikasi kepada ketiganya. Konsep misinformasi, disinformasi, dan malinformasi dijelaskan dalam suatu diagram venn yang dipisahkan dalam dua kategori sifat yaitu informasi yang bersifat palsu dan informasi yang memiliki intensi membahayakan.

Misinformasi adalah suatu kondisi penyampaian informasi dimana informasi yang disampaikan keliru, namun pihak yang menyampaikannya percaya bahwa informasi yang diberikan benar. Misinformasi lekat dengan ketidakakuratan informasi pada suatu kejadian tertentu.

Disinformasi adalah suatu kondisi penyampaian informasi dimana informasi yang disampaikan keliru dan pihak yang menyampaikan informasi sadar bahwa informasi yang disampaikan keliru. Hal ini termasuk pada kebohongan yang disengaja yang digerakkan oleh aktor-aktor tertentu.

Sedangkan, malinformasi adalah informasi yang berlandaskan pada fakta dan kebenaran, namun disalahgunakan untuk menyakiti/mengancam individu, suatu organisasi, bahkan suatu negara. Misalnya, suatu berkas mengenai perilaku seksual seseorang yang dapat mencemarkan

nama baik individu yang bersangkutan (UNESCO, 2018, p. 45-46).

Konsep ini dipilih karena dianggap sebagai bagian untuk menjelaskan berbagai terminologi terkait jenis konten seperti apa saja yang ditemui pada saat melakukan *fact-checking* dari segi materi atau konten.

2.2.3 Tujuh Jenis Kesalahan Naratif

Pembahasan terkait misinformasi, disinformasi, dan malinformasi tidak bisa digabungkan dengan perbedaan cara masing-masing pembuat berita dalam menyampaikan sebuah fakta yang diperoleh di lapangan. Sebab, dalam kasus yang sama, terdapat cara-cara yang berbeda di dalam menyampaikan peristiwa tersebut (UNESCO, 2018, 48).

Claire Wardle dan Hossein Derakhshan menyatakan bahwa perbedaan cara menyampaikan informasi atau yang disebut dalam narasi ini, sudah tertanam di dalam berita. Wardle dan Derakhshan juga menyampaikan bahwa narasi ini juga adalah narasi yang sama yang mungkin terkandung di dalam misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Narasi tersebut tertanam pada fakta yang dianggap penting dan ditonjolkan di dalam sebuah pemberitaan. Sebab bisa saja, suatu narasi yang menekankan ke hal-hal tertentu diangkat dalam sebuah konten, meskipun konten tersebut bukan merupakan konten yang bersifat misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misalnya, penyebutan ras, gender, status kewarganegaraan seseorang yang menjadi korban atau tersangka di kasus tertentu. Sesungguhnya penyebutan atau penonjolan narasi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang (ideologi, dll.) pembuat konten. Maka dari itu, penting untuk diadakan pemeriksaan narasi dalam suatu pemberitaan atau informasi, untuk

memisahkan mana fakta dan bukan fakta yang digunakan untuk tujuan tertentu (dalam UNESCO, 2018, 48).

Claire Wardle dari First Draft News mengategorikan kesalahan narasi tersebut ke dalam 7 kecacauan informasi. Istilah ini muncul untuk menampik istilah berita bohong (*fake news*) yang terlalu sering digunakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Wardle (2017) menyatakan bahwa istilah *fake news* tersebut tidak dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai ekosistem informasi yang ada. Daftar kecacauan informasi yang disusun ini pun dibuat berdasarkan kemampuan informasi tersebut untuk menghasilkan tipu daya (dalam Kruger, 2019, p. 266). Kecacauan informasi tersebut antara lain.

- 1) *Satire and Parody*, konten yang dikategorikan sebagai konten satir dan parodi adalah konten yang tidak memiliki intensi atau maksud untuk membahayakan pihak lain, namun berpotensi untuk membodohi pihak tertentu
- 2) *Misleading Content*, adalah jenis konten yang disalahgunakan untuk membingkai isu tertentu atau pihak tertentu. Hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan pemotongan (*cropping*) foto, pengutipan pernyataan di bagian tertentu, dsb.
- 3) *Imposter Content*, adalah jenis konten yang bersifat menipu. Biasanya kontennya adalah konten asli yang disalahgunakan oleh suatu pihak hingga membuat konten tersebut seolah-olah dibuat oleh pihak tertentu. Misalnya saja, sebuah konten yang dibuat atas nama media tertentu,

padahal media tersebut tidak pernah melakukan peliputan atau membuat konten seperti yang disebutkan.

- 4) *Fabricated Content*, adalah jenis konten keliru yang sengaja dibuat untuk memengaruhi pihak tertentu dan berpotensi untuk menjatuhkan pihak tertentu. Konten semacam ini hadir dalam bentuk teks atau konten visual dan biasanya ditujukan pada pengguna media sosial dari kalangan minoritas
- 5) *False Connection*, konten dikatakan memiliki hubungan yang salah ketika *headline*, foto, dan *caption* tidak mendukung satu sama lain.
- 6) *False Context*, adalah jenis konten yang isinya benar namun disebarakan secara salah. Misalnya, sebuah foto yang diproduksi di suatu masa, disebarakan kembali dengan konteks lain yang keliru
- 7) *Manipulated Content*, adalah kondisi di mana sebuah konten asli dimanipulasi dengan cara apapun untuk menjatuhkan pihak lain atau untuk membodohi pihak lain.

(Kruger, 2017, p. 265)

Penelitian ini hendak mengungkap pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com terhadap berbagai terminologi terkait *fact-checking*. Salah satu dimensi yang hendak diambil dari terminologi adalah dimensi konten. Melalui penelitian ini, peneliti berharap pengecek fakta di Kompas.com dapat melakukan penjabaran mengenai konten seperti apa yang dianggap berbahaya dan dapat dikategorikan ke dalam misinformasi, dll.

2.2.4 Online Journalism

Ward (2002) menjelaskan bahwa *online journalism* adalah proses jurnalistik yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan internet. Kinerja jurnalistik yang dimaksud meliputi penghimpunan data dan penulisan materi hingga proses publikasi (p. 9).

Dalam hal penghimpunan data dan penulisan materi berita, jurnalistik online memungkinkan jurnalis untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber, mengakses informasi dengan cepat, kemampuan untuk melakukan pengolahan data dengan fleksibel (misalnya: melalui data mentah), dan memungkinkan jurnalis untuk memperdalam materi temuan dengan melakukan diskusi atau bahkan debat melalui berbagai macam platform daring, seperti *email* (Ward, 2002, p. 20).

Online journalism memberikan berbagai macam tawaran baru bagi dunia jurnalistik, yakni kecepatan, *multiple pagination*, fleksibilitas akses *platform*, penyimpanan (*archiving*), hingga kemampuan untuk menjalin interaksi dengan pengguna (Ward, 2002, p. 20–25)

Dalam penelitian ini, media daring dalam *online journalism* dipilih sebab perhimpunan data dan informasi yang dipublikasikan dapat diperoleh secara tidak terbatas. Seluruh informasi yang berada di bawah payung internet, baik itu dari web hingga media sosial dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Padahal, belum tentu seluruh informasi yang disebarkan

secara daring ini memiliki kebenaran yang tersertifikasi, meskipun konten tersebut ramai diperbincangkan pengguna internet sekalipun.

2.3 Alur Penelitian

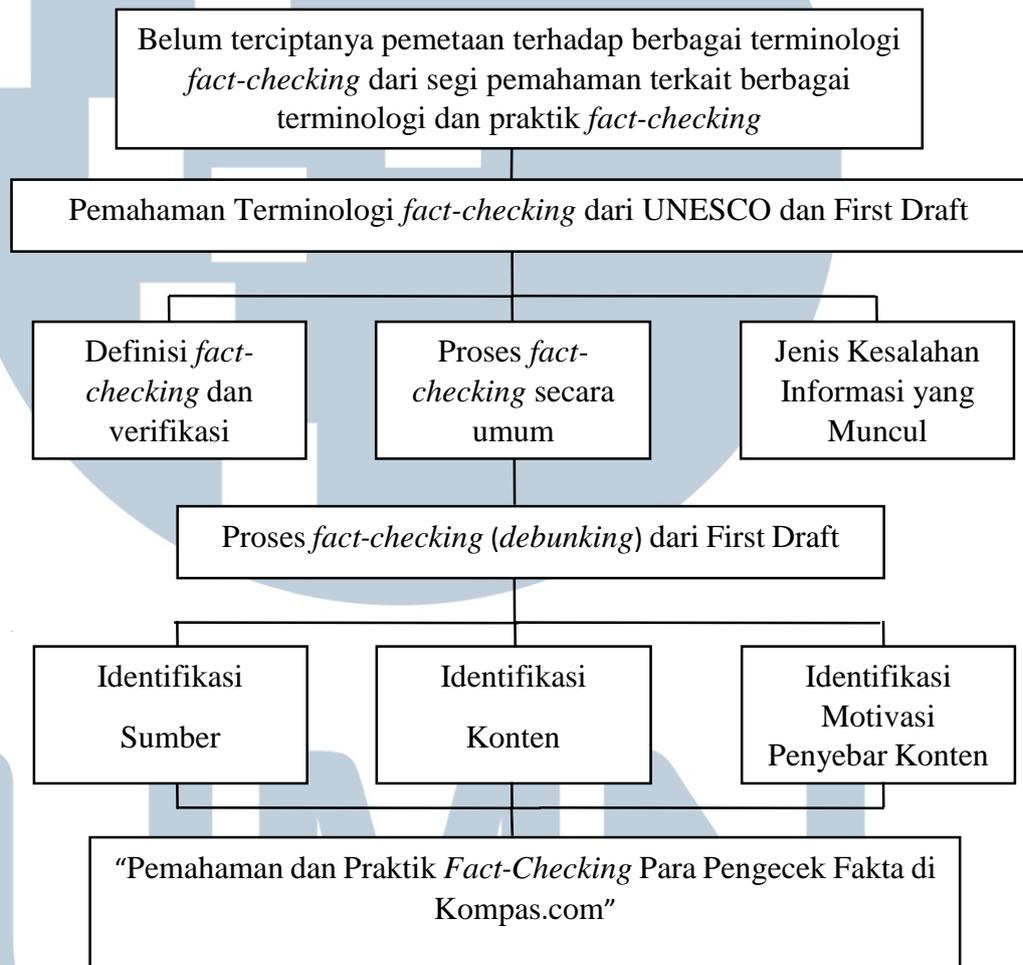
Graves (2016) menyatakan bahwa makna *fact-checking* telah melalui pergeseran makna. Saat ini, istilah *fact-checking* dalam ranah profesional lekat kaitannya dengan aktivitas elit politik. Meski demikian, saat ini *fact-checking* juga dilakukan pada konten viral yang ditemukan melalui media sosial. Meski demikian, masing terdapat pemahaman yang belum seragam di dalam mendefinisikan berbagai terminologi terkait *fact-checking* pada pekerja media di Indonesia sendiri. Penelitian ini berusaha untuk memetakan pemahaman dan praktik *fact-checking* dari para pengecek fakta di Kompas.com.

Peneliti berangkat dari penelusuran berbagai pemahaman mendasar yang berkaitan dengan pengertian *fact-checking* dan konsep lain yang bersinggungan dengannya hingga proses *fact-checking* yang peneliti peroleh dari penjabaran konsep milik UNESCO hingga First Draft News. Kemudian, peneliti juga melakukan identifikasi terkait proses *fact-checking* yang dilakukan oleh para pengecek fakta di Kompas.com yang disesuaikan dengan konsep milik First

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Draft News dalam kaitannya di dalam memeriksa konten multimedia yang tersebar melalui media sosial. Alur penelitian dijelaskan pada Bagan 2.1

Bagan 2.1 Alur Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com terkait berbagai terminologi dari konsep *fact-checking*. Terminologi yang dimaksud meliputi pemahaman terkait definisi dari *fact-*

checking dan juga bagaimana para pengecek fakta di Kompas.com mendefinisikan aktivitas ini dengan konsep verifikasi yang bersinggungan dengan prosesnya. Penelitian ini juga hendak menelusuri pemahaman terkait bagaimana disinformasi, misinformasi, dan malinformasi didefinisikan oleh para pengecek fakta di Kompas.com. Selain itu, penelitian ini juga hendak memetakan bagaimana para pengecek fakta di Kompas.com mampu memahami dan memetakan jenis penyakit informasi apa saja yang ditemukan di dalam melakukan kegiatan *fact-checking*. Peneliti juga akan melakukan penelusuran terkait pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com terkait proses *fact-checking* secara umum yang dilakukan dengan mencari dan menentukan informasi mana saja yang layak untuk diperiksa, melakukan uji kebenaran dengan menyertakan bukti pendukung, dan juga penentuan skala kebenaran. Secara garis besar, terminologi yang peneliti gunakan adalah terminologi yang bersumber dari modul milik UNESCO yang juga bekerja sama dengan IFCN dan First Draft News.

Setelah peneliti berhasil memperoleh tingkat pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com, peneliti akan bergerak pada penelusuran proses *fact-checking* di dalam ranah *debunking* yang dilakukan dengan menggunakan konsep pengecekan data digital yang peneliti ambil dari konsep milik First Draft News. Konsep milik First Draft News dipilih karena proses yang disusun oleh lembaga ini cocok digunakan di dalam melakukan *fact-checking* pada materi multimedia yang sedang viral melalui media sosial.

Proses pengecekan fakta yang dimaksud terbagi ke dalam tiga bagian yaitu

pengecekan sumber, pengecekan mendalam terkait konten yang ada dengan menggunakan peralatan verifikasi (*verification tools*) yang memadai, dan mencari motivasi yang melatarbelakangi penyebar konten di dalam menyebarkan konten digital yang menjadi viral di media sosial. Pengecekan sumber dilakukan dengan memeriksa aspek keaslian konten (*provenance*) dan penelusuran terhadap pengunggah utama (*source*). Pengecekan konten dilakukan dengan melakukan penelusuran pada aspek waktu/ tanggal (*date*) dan aspek keaslian lokasi (*location*). Pengecekan motivasi, sesuai konsep, dilakukan untuk mencari motivasi pelaku pembuat konten viral di dalam membuat dan menyebarkan konten tersebut. Pada akhirnya, peneliti akan menganalisis apakah ada kesesuaian terhadap pemahaman yang ada dengan proses yang dijalani oleh para pengecek fakta di Kompas.com di dalam melakukan pengecekan fakta melalui penelitian bertajuk *Pemahaman dan Praktik*

Fact-checking Para Pengecek Fakta di Kompas.Com ini

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA